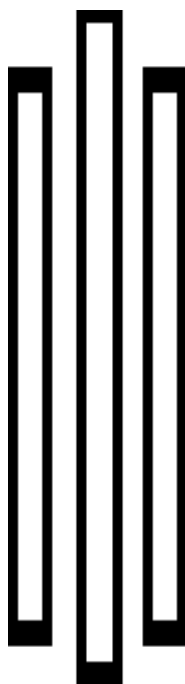




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN UDANAWU
JLN. RAYA KEDIRI NO. 802 TELP. 0342-551005**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistimatika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017	8
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telah Terhadap Kebijakan Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	32
3.2 Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

- 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kecamatan UDANAWU Kabupaten Blitar
- 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan UDANAWU Kabupaten Blitar
- 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kecamatan UDANAWU Kabupaten Blitar
- 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

1.1.1	Alur Penyusunan Renja SKPD	3
2.5.1	Kegiatan Musrenbang Tahun 2019	38
2.6.1	Evaluasi Hasil Renja RKPD terhadap Renja Kec. Udanawu.....	40

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Oleh karenanya kecamatan Udanawu diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa kecamatan Udanawu dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petagas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang "*menyentuh hati*" dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari "*dilayani*" menjadi "*melayani*".

Udanawu, 08 Agustus 2019

Drs. AHMAD HARYONO, MM.
Pembina
NIP. 19680711 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang “*menyentuh hati*” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan

kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari *“dilayani”* menjadi *“melayani”*.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia maksimal pada bulan oktober 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kecamatan Udanawu perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja SKPD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja SKPD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja SKPD yang mampu mensinergikan antara program dan kegiatan maupun dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembnagunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jnagka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2011 - 2016.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- h. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tata Organisasi dan Fungsi Serta Tata Cara Kecamatan;
- i. Surat Edaran dari Bupati Blitar Nomor : 050/1020/409.201.2/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja P) Tahun 2019

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dirumuskan Renja-P disesuaikan dengan tujuan Kecamatan Udanawu dan penyesuaian pada hasil evaluasi laporan program kegiatan tahun

berjalan. Sehingga tujuan yang ditekankan pada renja-P tahun 2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain.
2. Terdapatnya ruang aspirasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan implementasi (pelaksanaannya) program Kecamatan maupun desa.
3. Tercapainya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang selaras dengan RKPD 2019 dan RPJMD.

1.4.SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Udanawu adalah dengan menggunakan metode sesuai dengan Permen 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tribulan II

Bab ini memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan sampai dengan Tribulan II dengan mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikalikan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD Tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kecamatan Udanawu pada tahun 2018 telah melaksanakan 6 (Enam) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing – masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 122.858.956,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.121.823.906,- dengan prosentase penyerapan sebesar 99,16 %

Indikator programnya adalah : Penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,16 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 99,16 %

-Keberlanjutan :Meningkatnya kualitas pengetahuan aparatur dalam mengoperasikan fasilitas teknologi dan mempermudah akses informasi serta publikasi data terkait kegiatan Kecamatan, Anggaran, dan informasi lainnya.

-Hambatan : Kurangnya saran dan prasarana Teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.

-Pendorong : tingginya rasa tanggung jawab aparatur dan *dateline* penyelesaian tugas atau pekerjaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 79.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.78.775.100,- dengan prosentase penyerapan 98,96 %

Indikator programnya adalah : Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,96 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 98,96 %.

3. Program Perencanaan , penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesarRp. 9.875.000,-

Indikator programnya adalah : Jumlah laporan yang dikirim sesuai permintaan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah laporan yang dikirim sesuai permintaan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

4. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 108.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.074.500,- dengan prosentase penyerapan 100%

Indikator programnya adalah : Jumlah laporan monev dan evaluasi yang dibuat dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Restribusi Daerah
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi pajak dan restribusi daerah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi desa/kelurahan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
- c. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan
Indikator Outputnya adalah Jumlah Desa yang di evaluasi Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- d. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indikator Outputnya adalah peningkatan Kemampuan Aparatur Kecamatan Udanawu terhadap pengelolaan anggaran keuangan kecamatan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- f. Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LPMK, Karangtaruna, PKK, Muspika Perwosi, Posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi PKK desa/kelurahan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.
- g. Kegiatan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Desa/Kelurahan.
Indikator outputnya adalah terdatanya masyarakat di Kecamatan Udanawu yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 87,06 %

- h. Fasilitasi Monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Indikator Outputnya adalah tersalurkannya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%

- i. Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat.

Indikator Outputnya adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Udanawu terhadap nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dengan proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%

- j. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Indikator Outputnya adalah Terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di kawasan Kecamatan Udanawu Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100%

- 5. Program Pelayanan Kecamatan Rp. 17.960.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.760.000,- dengan prosentase penyerapan 98,89 %

Indikator programnya adalah : Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan. Dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,89 % .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kapasitas Aparatur Kecamatan

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

Khusus belanja langsung seharusnya ada peningkatan anggaran sehingga bisa membawa dampak yang lebih baik terhadap target capaian program

Renstra SKPD Kecamatan Udanawu terutama pada bidang pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

- Harus adanya internet yang cukup untuk pelayanan KTP, KK kepada masyarakat;
- Harus adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;
- Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh Kecamatan Udanawu dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.1.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten Blitar

Kecamatan Udanawu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Wajib		100%	97,75	93,8	55,12	0,587	93,8	246,67%	2,466%			
4	1	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	100%	97,75	93,8	55,12	0,587	93,8	246,67%	2,466%			
4	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	98%	98%	93,02%	0,968%	98%	289,02%	0,98%	
4	1	01	02	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	98%	98%	93,02%	0,968%	98%	289,02%	0,98%
4	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana Prasarana Kantor	100%	95%	90%	88,65%	0,985%	90%	273,65%	2,736%	
4	1	02	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	100%	95%	90%	88,65%	0,985%	90%	273,65%	2,736%
4	1	06	02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	00%	90%	0%	0%	90%	90%	0,9%
4	1	06	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP, Dokumen Laporan Keuangan, Renstra dan Review Renstra SKPD, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA, DPPA SKPD, Data LPPD, LPSE	100%	00%	90%	0%	0%	90%	90%	0,9%

4	1			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90%	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	294,1%	326,7%
4	1			Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	90%	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	294,1%	326,7%
4	1	63		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	99%	99,97%	95%	11,88%	0,125%	60%	171,85%	1,735%
4	1	63	01	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Restribusi Daerah tepat waktu	100%	99,90%	90%	50,50%	0,561%	90%	240,4%	2,404%
4	1	63	02	Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Desa / Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	1,052%	95%	295%	2,95%
				Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa/Kelurahan	100%	100%	95%	0	0%	95%	195%	1,95%
4	1	63	04	Bimtek Pengelolaan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	90%	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	294,1%	326,7%
4	1	63	05	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	1,108%	95%	295%	2,95%
4	1	63	06	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,105%	95%	295%	2,95%
4	1	63	07	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah (PMKS) Desa/ Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%

4	1	63	09	Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1	63	10	Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Musrenbang Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan	Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1			Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan tepat waktu	100%	100%	95%	100%	0,108%	95%	295%	2,95%
4	1	64		Program Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	90%	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	294,1%	326,7%
4	1	64	01	Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	90%	99,10%	95%	100%	1,108%	95%	294,1%	326,7%
4	1	64	02	Fasilitaasi Penerbitan Layanan Perijinan	Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	99%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	0,656%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Udanawu melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh kecamatan Udanawu dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya kecamatan Udanawu tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, kecamatan Udanawu akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika kecamatan Udanawu membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa kecamatan Udanawu belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Sehingga tolak ukur indikator kinerja kecamatan Udanawu hanya diukur dengan berapa besar anggaran yang tersedia dan direalisasikan, hal ini disebabkan karena SKPD yang terkait untuk menilai kinerja SKPD salah satu contohnya adalah Inspektorat tidak pernah memberikan hasil penilaian dari Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP-SKPD)

sehingga SKPD Kecamatan sampai tahun 2014 tidak pernah mengetahui sejauh mana kinerja SKPD mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dibenahi atau yang harus dipertahankan.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu pelayanan pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
2	Ketepatan waktu pelayanan pengantar Kartu Keluarga (KK)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
3	Ketepatan waktu pelayanan pengantar pindah tempat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
4	Ketepatan waktu pelayanan pengantar SKCK		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
5	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan lahir		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
6	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan miskin (SKM)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
7	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan waris		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
8	Ketepatan waktu pelayanan Surat Menyurat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	100 menit	100 menit	60 menit	30 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
9	Ketersediaan komputer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	5 unit	6 unit	8 unit	10 unit	terpenuhi target
10	Ketersediaan printer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	4 unit	6 unit	8 unit	10 unit	terpenuhi target

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Udanawu, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Udanawu dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Udanawu sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Udanawu yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Udanawu yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Udanawu.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Udanawu dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Udanawu, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan sehingga program dan kegiatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

5. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Udanawu sebagai berikut :

1. Kurangnya Jumlah dan kemampuan IT Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Udanawu sehingga pelayanan/laporan tidak cepat terselesaikan dan seringkali *overload*;
2. Masih belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik antar aparat di Kecamatan Udanawu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Udanawu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Udanawu, adapun masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja dan kerja sama (*team work*);

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2016 - 2021, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah

peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good govermance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Udanawu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah

pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan, oleh karena itu manajemen

keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain:

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “*Menuju Kabupaten Blitar lebih Sejahtera , maju dan berdaya saing.* “ . Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Udanawu untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Udanawu mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Udanawu masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Udanawu dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA SKPD;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Udanawu, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang.

Rencana strategis yang akan dilakukan Kecamatan Udanawu inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Udanawu berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Udanawu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kecamatan Udanawu Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil

Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 2.4.1, sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar*

Nama SKPD : KECAMATAN UDANAWU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kepuasan Aparatur	100%	110.708.214	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kepuasan Aparatur	100%	103.886.000,-	
1.1	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Udanawu	Jumlah jenis layanan administrasi Perkantoran	11 jenis	110.708.214	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Udanawu	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	11 jenis	103.886.000,-	Kenaikan Pagu harga barang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	151.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	85.820.000,-	
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Udanawu	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik	64 Unit	151.000.000	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Udanawu	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	112 Unit	85.820.000,-	Adanya pengurangan anggaran karena sebagian anggaran di alihkan ke peningkatan SDA
3	Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase dokumen Perencanaan,laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	10.700.000	Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase dokumen Perencanaan,laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	8.650.000,-	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Udanawu	Jumlah Dokumen	5 dokumen	3.920.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Udanawu	Jumlah Dokumen	8 dokumen	3.750.000,-	Ketidaksesuaian dokumen yang dibuat karena adanya tambahan dokumen yang minta oleh Instansi terkait

3.2	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen	5 Dokumen	4.360.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Udanawu	Jumlah Dokumen	11 Dokumen	3.150.000,-	Ketidaksesuaian dokumen yang dibuat karena adanya tambahan dokumen yang minta oleh Instansi terkait
3.3	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah.	Kecamatan Udanawu	Jumlah Desa/Kel. Yang memiliki Profil	12 Desa/Kel	2.420.000	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Kecamatan Udanawu	Jumlah Desa/Kel. yang memiliki Profil	12 Desa/Kel	1.750.000,-	Ketidaksesuaian karena pengurangan volume kunjungan ke Desa
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Udanawu	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	12.400.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Udanawu	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	81.100.000,-	
4.1	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	25 orang	12.400.000	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	17 orang	81.100.000,-	Karena adanya peraturan pemerintah, Setiap ASN wajib mengikuti Bimtek 20 JP
5	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Udanawu	Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik	91%	46.300.000	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kecamatan Udanawu	Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik	70%	560.656.000,-	
5.1	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Kecamatan Udanawu	Jumlah Desa yang dibina	12 Desa/Kel	13.550.000	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Kecamatan Udanawu	Jumlah Desa yang dibina	12 Desa/Kel.	472.206.000,-	Pilkades 10 Desa
5.2	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah	Kecamatan Udanawu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	12 Desa/Kel	13.100.000	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah	Kecamatan Udanawu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	12 kali	12.725.000,-	Karena adanya penurunan pagu anggaran
5.3	Fasilitasi , Pembinaan ,monitoring ,evaluasi Kantrantibmas, dan Penegakan Peraturan Perundangan	Kecamatan Udanawu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	12 Desa/Kel	10.750.000	Fasilitasi dan Pembinaan Kantrantibmas, Penegakan Peraturan Perundangan	Kecamatan Udanawu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	12 Desa/Kel	20.750.000,-	Peningkatan keamanan terkait dengan pilkada, pilkades dan sebagainya

5.4	Fasilitasi pmbinaan dan Monev ekonomi,Sosial Budya dan Keagamaan	Kecamatan Udanawu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	12 Desa/Kel	8.900.000	Fasilitasi pmbinaan dan Monev ekonomi,Sosial Budya dan Keagamaan	Kecamatan Udanawu	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	12 Desa/Kel	54.975.000,-	Pembinaan Masyarakat Desa
6	Program Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Persentase kepuasan masyarakat	90%	17.300.000	Program Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	70%	27.950.000,-	
6.1	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Jumlah Obyek Monev	12 Desa/Kel	13.300.000	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Udanawu	Jumlah obyek Monev	12 desa/kel	23.300.000,-	Adanya sosialisasi program baru untuk pengurusan usaha
6.2	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Udanawu	Jumlah ijin yang diterbitkan	ijin	4.000.000	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Udanawu	Jumlah ijin yang diterbitkan	100 ijin	4.650.000,-	Peningkatan Permintaan Ijin dari Masyarakat untuk usaha
J U M L A H					348.408.214					868.062.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan Januari);
2. Musrenbang tingkat Desa adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (minggu IV bulan Januari s/d minggu I bulan Februari);
3. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka (minggu II bulan Februari);
4. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
5. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (minggu II bulan Maret).

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung Kecamatan Udanawu pada tahun 2017 di bagi beberapa bidang, antara lain :

1. Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha Baru ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
2. Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;

3. Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
4. Peningkatan Infrastruktur ada 2 program/kegiatan yang diusulkan;
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan ada 2 program/kegiatan yang diusulkan.

Kegiatan Prioritas/Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (MUSRENBANG) Tahun 2019 Kec. Udanawu Kab. Blitar

Hasil Musrenbang Tahun 2019

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Desa	Volume		Page Indikatif (Rp.)		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan Verifikasi
								Usulan	Verifikasi	Usulan	Verifikasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	pembangunan 07	Dusun Tajur	UDANAWU	SMUNG	500 meter	100 m	290.000.000,-	100.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	diteliti
2	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan	Perbaikan jalan	desa hujung menuju desa ketembung	UDANAWU	TUNJUNG	1 km	1000 m	600.000.000,-	741.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	verifikasi
3	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pembangunan Instalasi Jaringin PMU dan Jaringin Listrik Desa/Dusun	Pengadaan lampu jalan desa	desa samboran	UDANAWU	SAMBERGAR	30 unit	30 titik	150.000.000,-	150.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	diteliti
4	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Peningkatan jalan t. dupatin	perbaikan jalan di km kantor desa Benuk kec. Udanawu kab. Blitar menuju Kab Kediri	Desa Benuk menuju desa Jemolan	UDANAWU	REGIR	700 meter	500 m	100.000.000,-	100.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	verifikasi
5	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	pembangunan drainage pemukiman	perumahan danggungbul	UDANAWU	MANDUNAN	200 meter	200 m	800.000.000,-	200.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	hasil lo bidang SDA

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Kecamatan	Desa	Volume		Page Indikatif (Rp.)		Penanggung Jawab	Verifikasi
								Usulan	Verifikasi	Usulan	Verifikasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Penataan Kota Karangas, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	pembangunan talud	Dusun Bangsanon	UDANAWU	BINGINANOM	800 meter	800 m	200.000.000,-	200.000.000,-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	diteliti

Gambar 2.5.1. Kegiatan Musrenbang Tahun 2019

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Tujuan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (*mind set dan culture set*)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya

waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari

pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam Permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se-Indonesia maksimal pada bulan oktober 2015.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2019 memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	1. Menyediakan kebutuhan pelayanan rutin administrasi perkantoran, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	2. Kebutuhan administrasi perkantoran dapat dipenuhi 3. Pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif
2.	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat segera dipenuhi/tepat waktu
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kerjasama Para Penyelenggara	Meningkatnya fasilitasi, monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev

<p>pemerintahan</p>		<p>Musrenbang Desa/ Kelurahan tepat waktu</p> <p>2. Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah tepat waktu</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Desa/ Kelurahan tepat waktu</p> <p>4. Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/ Kelurahan tepat waktu</p>
---------------------	--	---

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan

pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Udanawu. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Udanawu melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik sehubungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Udanawu pada tahun 2019 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu “*Menuju Kabupaten Blitar yang lebih Sejahtera, Maju dan berdaya saing* ”.

Jumlah seluruh program di tahun 2019 di Kecamatan Udanawu sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu kecamatan Udanawu dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 868.062.000,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2019 ada di tabel 3.3.1 dibawah ini :

Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Blitar

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
 KABUPATEN BLITAR

SKPD	KANTOR KECAMATAN UDANAWU	Kode Rekening	Usuran/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4.01.4.01.05.18	Usuran Pemerintahan Fungai Penunjang Kecamatan					898.956.000,00			366.158.500,00		
4.01.4.01.05.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kepuasan aparatur	kec.udanawu	100%	88.108.500,00	APBD KAB		110.708.500,00		
4.01.4.01.05.18.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran		Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	kec.udanawu	5 jenis	88.108.500,00	APBD KAB		110.708.500,00		
4.01.4.01.05.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	kec.udanawu	73%-82%	99.770.000,00	APBD KAB		129.950.000,00		
4.01.4.01.05.18.02.06	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sapras yang berfungsi baik	kec.udanawu	112 unit	99.770.000,00	APBD KAB	118 unit	129.950.000,00		
4.01.4.01.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	kec.udanawu	100%	47.200.000,00	APBD KAB		35.000.000,00		
4.01.4.01.05.18.05.01	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan		Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDA	kec.udanawu	5 orang	47.200.000,00	APBD KAB	16 orang	35.000.000,00		
4.01.4.01.05.18.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	kec.udanawu	100%	8.650.000,00	APBD KAB		10.700.000,00		
4.01.4.01.05.18.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		Jumlah dokumen yang disusun	kec.udanawu	8 dokumen	3.750.000,00	APBD KAB	8 dokumen	3.920.000,00		
4.01.4.01.05.18.06.02	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan		Jumlah dokumen yang disusun	kec.udanawu	11 dokumen	3.150.000,00	APBD KAB	11 dokumen	4.380.000,00		
4.01.4.01.05.18.06.03	Facilitasi Pengelolaan Data Wilayah		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Profil/Jumlah dokumen profil kecamatan	kec.udanawu	11 Desa:1 Dokumen	1.750.000,00	APBD KAB		2.420.000,00		
4.01.4.01.05.18.18	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan keterlibatan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun; Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik	kec.udanawu	80%; 78%-90%	626.277.500,00	APBD KAB		50.850.000,00		
4.01.4.01.05.18.18.01	Facilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan		Jumlah Desa yang dibina;Jumlah Perdes yang dievaluasi;Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	kec.udanawu	12 Desa:12 Perdes;9 Desa	536.987.500,00	APBD KAB		15.500.000,00		
4.01.4.01.05.18.18.02	Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	kec.udanawu	12 kali	12.725.000,00	APBD KAB		13.750.000,00		
4.01.4.01.05.18.18.03	Facilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan		Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	kec.udanawu	12 kali	20.750.000,00	APBD KAB		12.150.000,00		
4.01.4.01.05.18.18.05	Facilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan		Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	kec.udanawu	12 kali	55.815.000,00	APBD KAB		9.450.000,00		
4.01.4.01.05.18.22	Program Pelayanan Kecamatan		Persentase tingkat kepuasan masyarakat	kec.udanawu	100%	27.950.000,00	APBD KAB		28.950.000,00		
4.01.4.01.05.18.22.01	Facilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan		Jumlah obyek monev	kec.udanawu	12 Desa	23.300.000,00	APBD KAB		24.300.000,00		
4.01.4.01.05.18.22.02	Facilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan		Jumlah ijin yang diterbitkan	kec.udanawu	100 ijin	4.650.000,00	APBD KAB		4.650.000,00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah seluruh program kerja tahun 2019 di Rencana Kerja Perubahan sebanyak 6 (Enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 868.062.000,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Pada Renja-P ini sebagian besar dana digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa untuk 10 (sepuluh) Desa sebesar Rp 472.206.000,-.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib								
4	1	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian		100%	868.062.000,-	DAU		100%	366.158.500,-
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	103.886.000,-	DAU		100%	110.708.500,-
		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kec Udanawu	5 jenis	103.886.000,-	DAU		5 jenis	110.708.500,-
4	1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		73%-82%	85.820.000,-	DAU		80%	129.950.000,-
		Kegiatan Penyediaan Peningkatan Sarana dan	Kec Udanawu	112 Unit	85.820.000,-	DAU		118 Unit	129.950.000,-

				Prasarana Aparatur	berfungsi baik							
4	1			Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu		100%	8.650.000,-	DAU		100%	10.700.000,-
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen	Kec Udanawu	8 dokumen	3.750.000,-	DAU		8 dokumen	3.920.000,-
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	Kec Udanawu	11 dokumen	3.150.000,-	DAU		11 dokumen	4.360.000,-
				Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Jumlah desa/kel yang memiliki profil dan Jumlah profil Kecamatan	Kec Udanawu	12 Desa 1 Dokumen	1.750.000,-	DAU		12 Desa 1 Dokumen	2.420.000,-
	1			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	Kec Udanawu	100%	81.100.000,-	DAU		100%	35.000.000,-
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Kec Udanawu	5 orang	81.100.000,-	DAU		16 orang	35.000.000,-
4	1			Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Prosentase desa/kelurahan dengan administrasi yang berkualitas baik	Kec Udanawu	80%	560.656.000,-	DAU		80%	50.850.000,-

				Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Kec Udanawu	12 Desa 12 Perdes. 10 Pilkades	472.206.000,-	DAU	Pilkades 10 Desa	12 Desa 12 Perdes	15.500.000,-
				Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah	Kec Udanawu	12 kali	12.725.000,-	DAU		12 kali	13.750.000,-
				Kegiatan Fasilitasi,Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kantrabtibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrabtibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	Kec Udanawu	12 Desa	20.750.000,-	DAU		12 Desa	12.150.000,-
				Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan	Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan	Kec Udanawu	12 Desa	54.975.000,-	DAU		12 Desa	9.450.000,-
4	1			Program Pelayanan Kecamatan	Prosentase kepuasan masyarakat	Kec Udanawu	100%	27.950.000,-	DAU		100 %	28.950.000,-
				Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan	Kec Udanawu	12 Desa	23.300.000,-	DAU		12 Desa	24.300.000,-
				Kegiatan Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kec Udanawu	100 ijin	4.650.000,-	DAU		100 Ijin	4.050.000,-

BAB V **P E N U T U P**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Udanawu antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah (pelayanan publik)
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Penataan organisasi dan manajemen publik
4. Pengelolaan keuangan dan barang
5. Penyediaan ruang Arsip

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Udanawu masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Masih belum optimalnya Kecamatan Udanawu dalam memahami Program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA SKPD;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Masih kurangnya ruang arsip, sehingga Penataan administrasi, khususnya arsip dokumen yang sangat vital belum optimal

5. Kurangnya kerjasama yang baik antar aparat dalam menyelesaikan suatu program kegiatan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Udanawu, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Udanawu untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan penambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Mengoptimalkan pemahaman penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.
5. Mengusulkan untuk melakukan bimtek/pelatihan kegiatan berbasis *team work*.

Udanawu, 13 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN UDANAWU,

Drs. AHMAD HARYONO, MM.
NIP. 19680711 199303 1 006